

**PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PENYERAPAN ASPIRASI KONSTITUEN DI KECAMATAN
SIMPANG
KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Oleh:
HASANUDDIN ARITONANG
178510048**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

**PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PENYERAPAN ASPIRASI KONSTITUEN DI KECAMATAN
SIMPANG
KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area OLEH**

HASANUDDIN ARITONANG 178510048

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Konstituen Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Nama Mahasiswa : Hasanuddin Aritonang

NPM : 178510048

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Agung Suharyanto, S.Sn.,M.Si



Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.I.P

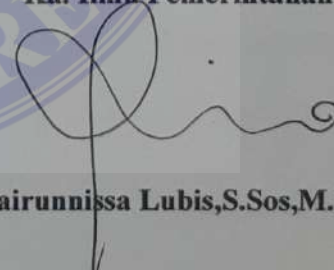
Mengetahui:

Dekan

Ka. Ilmu Pemerintahan



Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si



Khairunnissa Lubis, S.Sos, M.I.Pol

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Januari 2022

Hasanuddin Aritonang

178510048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanuddin Aritonang
NPM : 178510048
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 12 Januari 2022

Yang menyatakan,

Hasanuddin Aritonang

ABSTRAK

Anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dengan rumusan masalah Bagaimana peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi konstituen dan Apa saja hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu melalui : peran sebagai komunikator, dimana anggota DPRK Aceh Singkil dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, keuangan dan pengawasan akan tetapi DPRK Aceh Singkil terus berusaha sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik untuk menampung dan menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi dengan melakukan reses (kunjungan secara langsung), Sementara itu peran sebagai aktor yang dilakukan DPRK Aceh Singkil ialah menjalankan peran dan kredibilitasnya selaku wakil rakyat secara optimal dengan menyuarakan aspirasi masyarakat, pemberian bantuan dalam bentuk sosial ekonomi dan pendidikan walaupun belum menyeluruh keseluruhan daerah. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Simpang Kanan berdasarkan hasil penelitian mengalami 2 (dua) kendala, yaitu: keterbatasan waktu anggota dewan dalam mengatur pertemuan dan jadwal kepada masyarakat, yang kedua yaitu minimnya partisipasi masyarakat Simpang Kanan untuk mengikuti program dan kunjungan yang sudah dijadwalkan oleh para pihak Kecamatan dan DPRK Aceh Singkil (timbulnya kekecewaan masyarakat Simpang Kanan).

Kata Kunci : Peran, DPRD Aceh Singkil, Aspirasi Masyarakat

ABSTRACT

Members of the Regency DPRD, among others, have the obligation to absorb and collect constituents' aspirations through regular working visits, accommodate and follow up on community aspirations and complaints, and provide moral and political accountability to constituents in their constituencies. With the formulation of the problem What is the role of members of the House of Representatives in absorbing the aspirations of their constituents and what are the obstacles faced by the House of Representatives of Aceh Singkil Regency in absorbing the aspirations of constituents in Simpang Kanan District, Aceh Singkil Regency?. Where in this study the author uses qualitative research methods used to examine the condition of natural objects where the researcher is the key instrument, sampling of data sources is carried out purposively, collection techniques are triangulation, data analysis is inductive/qualitative, and qualitative research results are more emphasize meaning rather than generalization.

Based on the results of the research that the role of DPRD members in absorbing the aspirations of the people in Simpang Kanan District is carried out through 2 (two) stages, namely through: the role of communicators, where members of the Aceh Singkil DPRK in the government system do not only act as makers of legislation, finance and supervision. however, the Aceh Singkil DPRK continues to strive as a medium of communication between the community and the government, both to accommodate and convey information, socialization, motivation and as a place for discussion by conducting recess (direct visits), Meanwhile the role as an actor carried out by the Aceh Singkil DPRK is to carry out their role and credibility as people's representatives optimally by voicing the aspirations of the community, providing assistance in the form of socio-economic and education although it is not yet comprehensive throughout the region. The aspirations of the Simpang Kanan community based on the results of the study experienced 2 (two) obstacles, namely: limited time for council members in arranging meetings and schedules for the community, the second was the lack of participation of the Simpang Kanan community to participate in programs and visits that had been scheduled by the District and DPRK Aceh Singkil (the emergence of disappointment in the Simpang Kanan community).

Keywords: *Role, DPRD Aceh Singkil, Community Aspiration*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial dan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYERAPAN ASPIRASI KONSTITUEN DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dadan Ramdan,M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu DR.Effiati Juliana Hasibuan,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis,S.Sos,M.I.Pol selaku Ka Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., MIP selaku Pembimbing II dan juga Ka Prodi yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Semua Informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Januari 2022

Hasanuddin Aritonang
178510048

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebuah negara tidak diukur dari segi banyaknya partai politik. Artinya semakin banyak partai politik tidak berarti semakin banyak partai tidak berarti semakin baik demokrasi di negara ini, tetapi ukuran yang lazim dipakai sejauhmana sebuah negara secara kualitas dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang dikandung dalam demokrasi itu kedalam penyelenggaraannya (Purnama, 2007: 22-23).

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, rakyat merupakan orang-orang yang akan memilih wakilnya dalam rangka mengambil keputusan bagi masyarakat di parlemen. Sebagai implementasi dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, muncul beberapa prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam pelaksanaan demokrasi, akuntabilitas berarti bahwa wakil rakyat harus mampu menunjukkan rasa bertanggungjawab kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai wakil rakyat, selain akuntabilitas wakil rakyat juga harus memiliki sikap transparansi dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat.

Partisipasi publik melalui parlemen, melalui demokrasi perwakilan dapat didorong oleh partai-partai politik atau fraksi-fraksi mereka. Partisipasi melalui parlemen ini memiliki legitimasi hukum-prosedural yang kuat, namun seringkali tidak efektif, karena prosedur-prosedur formal demokrasi

perwakilan yang disalurkan melalui partai-partai politik atau fraksi-fraksi mereka dalam parlemen seringkali gagal dalam mengutamakan kepenringan-kepentingan rakyat ke dalam keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut (Tweedie, 2008: 99).

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana DPR sebagai wakil rakyat harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan caraeksplisit eksistensi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang telah dipilih melalui pemilu. Sesuai dengan kata *parliament*, berasal dari kata *parle*, yang artinya bicara, maka naggota DPR seyogyanya punya tugas berbicara, menyampaikan suara yang diwakilinya. Karena itulah, Daniel Dhakidae menamakan fungsi parlemen tersebut sebagai kuasa wicara rakyat (Purnama, 2007).

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPR, tentunya DPR tidak terlepas dari sikap dan eksistensi DPR dalam sistem Negara Republik Indonesia. Dimana kehadiran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, khususnya rakyat Indonesia yang dipilih langsung oleh dan dipercayai oleh rakyatnya. Sehingga DPR buka hanya memiliki legitimasi untuk kepentingan rakyatnya, namun DPR juga harus mampu menyerap, menampung dan bertindak sesuai harapan masyarakat.

Sebagai salah satu Badan Legislatif yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, maka ada beberapa tugas

dan fungsi yang harus dijalankan dengan baik yaitu:

- Meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia
- Melakukan penyelidikan akan suatu kebijakan pemerintah yang dicurigai bertentangan dengan Undang-undang
- Memberi pendapat mengenai kebijakan dalam negeri yang menimbulkan kejadian luar biasa dan ikut menyumbang solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut'

Kehadiran Lembaga Negara dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, menjadi perubahan dalam sistem demokrasi, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Negara yang kedepannya mampu mewujudkan dan melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia. Sistem pemerintahan yang demokrasi tentunya memiliki harapan yang baik untuk perkembangan Indonesia, dimana Lembaga Negara dan Wakil Rakyat diharapkan mampu memberikan terobosan baru dan menempatkan rakyat sebagai prioritas dari bentuk pengambilan keputusan kedepannya.

Dituliskan dalam pasal 40 pada Undang-Undang tersebut bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 45). Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam penelitian ini maka peneliti akan melihat peran DPR Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi masyarakat atau kontituennya. DPR dimana disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil atau disingkat dengan (DPRK Aceh Singkil). Peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi masyarakat atau konstituennya dapat dilihat ketika demonstrasi penolakan UU Omnibus Law. Yaitu DPRK Aceh Singkil menandatangani petisi menolak Omnibus Law - UU Tenaga Kerja beberapa waktu lalu. Dimana massa yang menggelar demonstrasi untuk mendesak anggota Dewan untuk menolak pengesahan Undang-Undang tersebut. Dipimpin langsung Ketua DPRK Aceh Singkil menemui massa demonstran, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat dan kemudian setuju untuk menandatangani petisi yang diajukan oleh para demonstran. Dengan ditandatanganinya petisi tersebut merupakan bukti bahwa DPRK Aceh Singkil berperan dalam dalam menyerap aspirasi kontituennya. Hal ini merupakan hal positif bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut bagaimana peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penyerapan aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Dan kendala apa saja bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan

perannya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi konstituennya di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui hambatan yang didapat oleh DPRK Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi masyarakat (Konstituennya) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian pemerintahan dan social politik terutama mengenai kajian peran DPRD

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian sosial dan politik

b. Bagi DPRK Aceh Singkil

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRK Aceh Singkil dalam menyalurkan aspirasi masyarakat

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang peran lembaga legislatif. Juga menjadi sebuah rujukan untuk penulis skripsi yang akan datang dengan tema skripsi yang sama. Selain juga menjadi sebuah data-data yang bisa menjadi sekedar sebuah diskusi untuk meningkatkan wawasan pembaca pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.(Soekanto, 2009 : 212). Hakekat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Pengertian peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab akibat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Dimensi yang melekat pada peran sebagaimana yang dikemukakan Hardjanto (2002:24) maka dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. *Equality* (Persamaan)

Pengertian *Equality* (Persamaan) sebagaimana yang dikemukakan

Hardjanto (2002:24) yaitu: “Dimensi Pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terlibat dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal pembuatan kebijakan”.

2. *Consensus Orientation* (Kesepakatan Bersama)

Pengertian *Consensus Orientation* (Kesepakatan Bersama) sebagaimana yang dikemukakan Hardjanto (2002:24) yaitu: “kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintah dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan”.

3. *Participation* (Partisipasi)

Pengertian *Participation* (Partisipasi) sebagaimana yang dikemukakan Hardjanto (2002:24) yaitu: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun non fisik.

4. *Responsiveness*

Pengertian *Responsiveness* sebagaimana yang dikemukakan Hardjanto (2002:24) yaitu “ Segala kebijakan yang telah disepakati direspon secara bersama baik pemerintah maupun oleh masyarakat melalui Lembaga Pengembangan Kualitas Manusia (LPMK)”.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya.

Mengenai peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa

peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsible*.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk menurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang nelandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
- e. Peran sebagai terapi. Menutup persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2.2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4 UU 32/2004). Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (2) UU 32/2004). Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU 32/2004). Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota (Asshiddiqie, 2006: 39).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4 UU 32/2004). Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (2) UU 32/2004). Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU 32/2004). Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah.

Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota (Asshiddiqie, 2006: 39). Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 41 ayat(1) UU 32/2004): (i). membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; (ii) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan

kepala daerah; (iii) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; (iv) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; (v) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; (vi) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (vii) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; (viii) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ix) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (x) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan (xi) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membeban masyarakat dan daerah.

Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi

pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Sinamo, 2010: 49).

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan (Kansil, 2008: 22).

Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan (Kaho, 2007). Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap

kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket (Tutik, 2010: 9).

Pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat itu terkesan sebagai bonus kepada DPRD yang kewenangan dan haknya telah direduksi oleh UU 32/2004. Menurut UU ini, DPRD hanya dapat sekadar “memanggil” Kepala Daerah untuk dimintai keterangan tanpa kewenangan memberikan sanksi. Di dalam UU ini tidak tegas dan jelas apa akibat hukum atau sanksinya jika saran atau rekomendasi DPRD tidak diindahkan oleh Kepala Daerah (Sinamo, 2010: 50). Lebih dari itu, fungsi pengawasan DPRD menuntut DPRD untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, legislative review dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Dalam praktiknya, istilah legislatif review ini tidak populer lantaran membutuhkan SDM anggota DPRD yang capable (Hamidi, 2011: 87-88).

Pengujian Perda melalui legislative review ini menunjukkan bahwa DPRD dalam fungsi legislasinya melakukan pengawasan terhadap Perda sehingga sebelum sebuah Raperda di-perda-kan seharusnya terlebih dahulu melewati proses kajian legislasi. Jika Raperda itu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi maka ia dapat disahkan dan diundangkan; sebaliknya, jika tidak demikian maka tidak boleh disahkan (Hamidi, 2011: 88).

2.3. Aspirasi

Aspirasi berawal dari kata *aspire*, yang artinya bersita-cita atau menginginkan. Hoetomo (2005: 27) menyebutkan aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Slameto (2003: 66) menambahkan bahwa aspirasi sebagai harapan atau keinginan individu akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu.

Aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani (Hurlock, 1979: 109).

Hurlock (1979: 111) mengelompokan aspirasi berdasarkan usaha individu dalam memperoleh target yang telah ditetapkan. Aspirasi yang dimiliki individu dapat berupa:

- a. Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang: Aspirasi ini ditinjau dari orientasi kebutuhan individu berupa jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pokok utama yang mendasari aspirasi jangka pendek adalah keinginan seseorang sesuai kesuksesan dan kegagalan yang terjadi pada masa lalu dan dari tekanan sosial yang terjadi pada seseorang yang menjadikan dirinya membentuk aspirasi. Aspirasi jangka panjang dipengaruhi oleh

faktor kepentingan dan pembawaan, tekanan budaya, dan hubungan antara kesuksesan dan kegagalan masalah. Oleh karena itu, tidak seperti aspirasi jangka pendek, yang sedikit dipengaruhi oleh keadaan daripada menggambarkan hal tertentu. Aspirasi jangka panjang merupakan suatu hal yang kompleks dengan melibatkan berbagai contoh jenis faktor yang lain.

- b. Aspirasi positif atau negatif: Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu untuk mencapai kesuksesan tergantung bagaimana individu memaknai keinginannya. Aspirasi negatif merupakan pokok utama untuk menjauhkan diri dari kegagalan ketika aspirasi positif diarahkan untuk mencapai kesuksesan. Jika aspirasi seorang positif, dia merasa puas dan memperhatikan dirinya sebagai orang yang sukses, terutama dalam menggambarkan statusnya. Jika aspirasi negatif, maka akan menjadi hal utama untuk mempertahankan gambaran statusnya dan menjauhi hal-hal yang menjadikan dirinya rendah pada tingkat sosial.
- c. Aspirasi realistis atau tidak realistis: Aspirasi ini ditinjau dari kesadaran individu dalam kemampuannya dalam mencapai aspirasi yang diinginkan.

Beberapa aspirasi yang realistis pada seorang merupakan pembedaan berupa pencapaian tujuan yang diatur untuk dirinya sendiri, namun untuk waktu yang lama menjadi tidak realistis karena menjadikan seseorang kurang menggali potensi yang ada pada dirinya dalam mencapai tujuan, tidak peduli seberapa kuat motivasinya dan seberapa keras seseorang bekerja serta berkorban. Aspirasi tidak realistis merupakan aspirasi yang berdasarkan ketidaktahuan seseorang dalam mengukur kemampuannya.

Jadi aspirasi merupakan harapan dan tujuan seseorang dalam memperoleh target berupa aspirasi jangka pendek atau jangka panjang yang ditinjau dari orientasi kebutuhan individu, aspirasi positif atau negatif yang ditinjau dari orientasi individu mencapai kesuksesan, dan aspirasi realistis atau tidak realistis yang ditinjau dari kesadaran individu akan kemampuannya.

2.4. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Penyerapan Aspirasi Masyarakat Proses Penyerapan aspirasi masyarakat ada dua yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah melalui proses perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung (Dwiyanto, dkk 2003). Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Menurut Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), secara umum dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu :

1. Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat; yang pertama, *self selected*, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, rekrutmen terseleksi, yaitu hanya orang –

orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, *random selection* yang juga sering dikenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing-masing komunitas. Keempat, *lay stakeholders*, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar. Sekelompok warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu. Kita sudah mengenal prinsip penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelima, *Professional Stakeholders*, yaitu pembuatan kebijakan publik yang melibatkan tenaga-tenaga profesional yang digaji atau diberi honorarium. Asumsinya, tenaga-tenaga profesional ini memiliki kapasitas menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
3. Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan.

Semakin relevan produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

Sedangkan menurut Marwati (2007:52) ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

1. Aspirasi dalam bentuk tertulis, yakni keinginan masyarakat dalam bentuk catatan atau surat ditunjukkan kepada ketua DPRD tentang :
 - a. Dukungan kepada seseorang/individu, yaitu aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan dukungan kepada orang/individu akibat dari prestasi yang diraihinya yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu.
 - b. Pernyataan, yaitu tentang pernyataan kesiapan individu atau suatu kelompok untuk mendukung pejabat memperoleh kursi di dewan atau kepala pemerintahan.
2. Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu disampaikan secara terbuka di depan ketua DPRD dan dewanlainnya. Jika jawaban diharapkan secara langsung maka anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi secara lisan dibacakan di depan anggota dewan untuk didengar
3. Aspirasi dalam bentuk perseorangan, adalah pernyataan tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.
4. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipati terhadap suatu badan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam UU No. 9/1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat-lambatnya 3x24

jam sebelum kegiatan.

5. Aspirasi kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan

2.5. Konstituen

Konstituen diartikan sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang diwakili, maupun kelompok sasaran yang harus dilayani partai atau parlemen.

Mengingat belum disepakatinya pemahaman tentang konstituen, maka menyepakati untuk memahami konstituen sebagai Pemilih di satu daerah pemilihan, yang artinya disana terdiri dari anggota partai, simpatisan partai dan pemilih yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan partai. Konstituen mempunyai spektrum kuantitatif lebih luas dari anggota partai, tetapi tingkat komitmennya terhadap eksistensi partai lebih rendah daripada anggota.

Adapun konstituen saat ini merupakan pilar penting bagi penentuan kekuatan dan pengembangan partai politik. Semakin banyak partai mendapatkan suara dari pemilih pada saat Pemilu semakin besar pula pengaruh partai dalam ikut menentukan arah kebijakan negara baik di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kuatnya pengaruh dalam ikut menentukan kebijakan pembangunan bangsa menjadikan partai juga semakin besar menguasai aset dan akses yang dimiliki oleh negara dan ini menjadi

landasan penting bagi penguatan dan pengembangan partai itu sendiri.

Seringkali aspirasi dan tuntutan kebutuhan konstituen direspon oleh partai dan atau kader partai dengan melakukan kegiatan-kegiatan karitatif, misalnya, sepeda gembira, gerak jalan sehat, pasar rakyat, pengobatan gratis, pertunjukan seni hiburan, kegiatan keagamaan/spiritual, dan perlombaan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini tidak salah. Hanya menjadi kurang efektif apabila jangkauan tujuan kegiatannya kabur, peserta heterogen, massif, sekedar publisitas, dan bahkan sporadis sehingga kurang dirasa menjawab persoalan riil konstituen. Memang banyak yang ditempuh lewat kegiatan praktis, tapi banyak pula kegiatan yang bersifat deseminasi ide-ide politik yang cerdas berdasar program dan garis perjuangan partai. Karena itu menangkap aspirasi dan mengartikulasikan kepentingan merupakan kerja politik simultan oleh kader di dalam menjaga keberlangsungan hubungan dengan konstituen (Subagyo, 2011: 44).

2.6. Penelitian Terdahulu

1. Paendong Joan Lolowang dalam Jurnal Politico berjudul Peran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini meneliti salah satu peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun faktanya peran ini masih sering tidak dijalankan oleh anggota DPRD, atau walaupun dijalankan itu tidak maksimal. Penelitian ini akan mengkaji peran anggota DPRD Kabupaten Minahasa, khususnya anggota fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan

fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tersebut akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Archon Fung yang secara umum mengemukakan tentang metode untuk memahami aspirasi rakyat. Menurutnya untuk memahami aspirasi masyarakat dapat dilihat dari luas lingkup partisipasi. Kemudian yang berikutnya dapat dilihat dari bagaimana jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Temuan penelitian menggambarkan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan terlihat sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Terkait bentuk komunikasi yang dilakukan anggota DPRD terhadap konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sehingga mengganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kemudian faktor

ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kuantitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi dari peserta reses.

2. Dessi Permata Sari (2016) dengan Judul Skrisinya Pelaksanaan Peyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD NASDEM Peroide 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan penyerapan aspirasi masayakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses tahun 2014, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui: 1) Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses tahun 2014, 2) Faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah DPRD Kota Semarang, DPD Partai Nasdem Kota Semarang, dan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Fokus penelitiannya adalah: 1) Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses tahun 2014 meliputi: dasar hukum pelaksanaan reses, anggaran reses, tahap-tahapan pelaksanaan reses, bentuk kegiatan reses dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,

- 2) Faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014.
3. Indah Pratiwi (2013) Skripsi dengan Judul Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini Bagaimana fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian dan lapangan norma yang mengatur tentang pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD, menempatkan posisi DPRD yang lemah, yaitu hanya sebagai pihak yang membahas rancangan APBD, bukan sebagai salah satu pihak yang turun penyusun perencanaan APBD. Belum maksimalnya kemampuan para anggota DPRD dibidang anggaran, sehingga memposisikan para anggota DPRD sebagai pendengar belaka artinya, hanya sebagai pihak yang membahas tanpa ada usaha untuk menyarankan kedudukannya dengan pemerintah daerah Kepala daerah dibidang anggaran pemerintahan daerah. Belum adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan anggaran pemerintahan daerah secara terstruktur dan tersistem (kalaupun ada hanya bersifat pasif) dalam setiap perencanaan dan penetapan anggaran pemerintahan daerah, lebih khusus lagi pada anggaran DPRD. Perlu dilakukan perubahan hukum (legal reform) atas norma yang mengatur fungsi anggaran DPRD baik dalam UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU. No. 27 tahun 2000 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maupun dalam PP.No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP. No.

16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD. Yang menempatkan kedudukan yang sama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Kepala daerah dan perangkatnya) dibidang anggaran artinya, sama sama memiliki kewenangan untuk merencanakan APBD yang dibahas dan disetujui bersama.

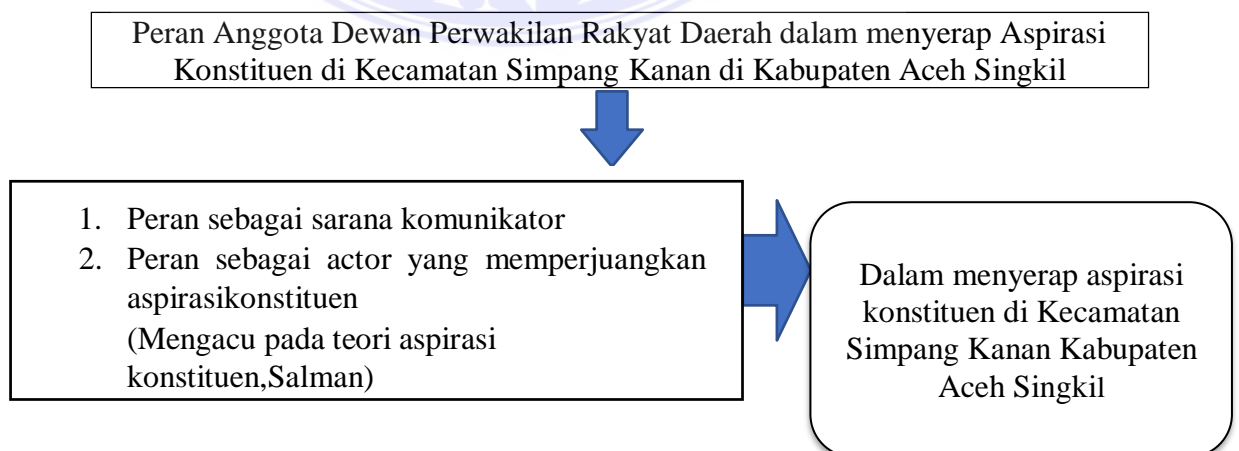
4. Alfines Tunggal, 2013 dengan judul Skripsi Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman. Parlemen atas pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tersebut APBN di Kabupaten Sleman, metode yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu fokus penelitian yang dilakukan pada perilaku masyarakat. Penelitian dilakukan langsung kepada responden karena data primer didukung oleh data sekunder data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan itu ada, bahwa pelaksanaan pengawasan Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan (1) mendirikan alat kelengkapan, (2) pengawasan langsung program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan, (3) Menyerap aspirasi baik dengan masyarakat pada saat istirahat atau tidak, (4) evaluasi anggaran eksekutif laporan pertanggungjawaban; (5) Memantau anggaran sebagai program evaluasi dibiayai, dan (6) Terlibat secara aktif dalam pembahasan anggaran daerah dan sinkronisasi dan korelasi tahun anggaran sebelumnya dan evaluasi hasil / pencapaian / program kinerja sebagai layanan terkait program.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian-penelitian diatas adalah: dalam Skripsi yang disampaikan Dessi Permata Sari hanya melihat penyerapan aspirasi masyarakat pada masa Reses saja dan melihat Pastai Nasdem saja. Dalam penelitaian Alfines dan Indra Patiwi lebih mengemukakan mengenai peran terhadap pengawasan anggaran. Namun dalam pemelitiaan saya lakukan melihat secara keseluruhan Peran DPRK Aceh Singkil dalam peyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

2.7. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah teori terkait penyerapan aspirasi masyarakat yang dimana teori ini akan membantu penulis untuk membahas peran-peran DPRK Aceh Singkil dalam menampung aspirasi masyarakat pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kanan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam penelitiannya yaitu:



(Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis dan secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan aspirasi Konstituen di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama

penelitian berlangsung (Moleong 2007:10).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan penelitian kualitatif dapat menjelaskan dan menggabarkan keadaan objek di Dwwn Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Aceh Singkil dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan si peneliti juga dapat menyesuaikan keadaan yang tak terduga pada penelitian berlangsung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ialah di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (DPRK Aceh Singkil) tepatnya berada di jalan P.Baru Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut ialah bahwa DPRK Aceh Singkil merupakan Kantor Perwakilan Rakyat, dimana masyarakat akan menyampaikan berbagai bentuk aspirasinya ke kantor tersebut. Dengan kata lain merupakan lokasi yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data yang diharapkan.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini berkisar selama 3-6 bulan, maka berikut rincian waktu penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Des 2021	Jan 2022
1	Penyusunan proposal							
2	Seminar proposal							
3	Perbaikan proposal							
4	Pengambilan Data							
5	Penyusunan skripsi							
6	Seminar hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang meja hijau							

3.3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2004), informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan yaitu:

1. Informan Kunci

Informan Kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ialah Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil yaitu :

- a) H. Amaliun
- b) H. Safriadi, SH

2. Informan Utama

Informan Utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Dengan demikian informan utama dapat diartikan sebagai orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian yang akan dipelajari. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Simpang Kanan yaitu :

- a) Wanhendra
- b) Yuniarti
- c) Firda

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran penduduk dari data utama terkait masalah penelitian. Informasi tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau

informan kunci. Untuk itu yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini adalah staff atau anggota di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yaitu :

- a) Ade Dwi Sintya
- b) Yulihardi
- c) Taufik A.Md
- d) Tetty Wahyuni
- e) Lesdin Tumangger

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Moleong (2010: 9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, penelitian mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan

untuk melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. Adapun observasi tersebut bersifat langsung non partisipatori, artinya dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga tidak mempengaruhi kealamian dari segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai para responden yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat uraian kata.

3. Dokumentasi

Yang mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, telaah dokumen dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan.

3.5 Teknis Analisis Data

Sugiyono (2009: 89) menyatakan bahwa: Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (Sugiyono, 2009: 89) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 91) yang mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta dari informasi lain mengenai efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan agar dapat mengkaji penelitian secara detail. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono (2009: 95) “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, maka *display* data yang dilakukan lebih banyak dituangkan kedalam uraian. Setelah peneliti mendapat data yang diinginkan, peneliti akan menguraikannya pada bentuk catatan agar dapat melihat apa yang terjadi pada objek yang diteliti secara detail tanpa mengurangi informasi yang didapat dari hasil wawancara agar penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang akurat.

3. Kesimpulan (*Verification*)

Menurut Sugiyono (2009: 99) bahwa: kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyerap aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan hasil pembahasan, yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik untuk membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

1. Peran anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu melalui : peran sebagai komunikator, dimana anggota DPRK Aceh Singkil dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, keuangan dan pengawasan akan tetapi DPRK Aceh Singkil terus berusaha sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik untuk menampung dan menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi dengan melakukan reses (kunjungan secara langsung), komunikasi melalui pendekatan personil dengan bantuan becak dan pemberian masker ke setiap daerah. Sementara itu peran sebagai aktor yang dilakukan DPRK Aceh Singkil ialah menjalankan peran dan kredibilitasnya selaku wakil rakyat secara optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan kunjungan, pemberian bantuan dalam bentuk sosial ekonomi dan pendidikan walaupun belum menyeluruh keseluruhan daerah.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat

Simpang Kanan berdasarkan hasil penelitian mengalami 2 (dua) kendala, yaitu: keterbatasan waktu anggota dewan dalam mengatur pertemuan dan jadwal kepada masyarakat, yang kedua yaitu minimnya partisipasi masyarakat Simpang Kanan untuk mengikuti program dan kunjungan yang sudah dijadwalkan oleh para pihak Kecamatan dan DPRK Aceh Singkil (timbulnya kekecewaan masyarakat Simpang Kanan).

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kepada anggota DPRK Aceh Singkil untuk dapat meningkatkan proses menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat dan kemudian dapat ditindaklanjuti.
2. Kepada anggota DPRK Aceh Singkil dituntut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah di Aceh Singkil.
3. Diharapkan DPRK Aceh Singkil dapat melakukan kunjungan rutin ke setiap daerahnya, guna meningkatkan kedekatan personal kepada masyarakat dan membangun kembali kepercayaan masyarakat akan kinerja dan tugas fungsi DPRK.
4. Untuk membangun Kabupaten Aceh Singkil, perlu kerjasama DPRK dan keterlibatan Masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Subagyo, Arie., Winardi, Eko., Wibisono, Agus Gunawan., Utomo, Joko., & M. Syarifudin., (2011). *Pilar Utama Partai Politik Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen*, PT. Gramedia Cetakan, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly., (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

C.S.T. Kansil., dan Christine S.T. Kansil., (2008). *Hukum Tata Negara RI*, RinekaCipta, Jakarta.

Hardjanto, Imam., (2002). *Teori Manajemen Publik*, Bahan Ajar FIA UB . FIA Universitas Brawijaya. Malang.

Hurlock, E.B., (1979). *Personality Development*. Mc Graw-Hill, New Delhi.

Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa, Acmad., (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.

Hoetomo, M. A., (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra pelajar. Surabaya

Hamidi, Jazim., (2009). *Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (Aaupl) Di Lingkungan Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Riwu, Kaho Josef., (2007). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J., (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya Offset.

Purnama, Eddy., (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain*, Cetakan Kesatu, Nusamedia, Bandung.

Sinamo, Nomensen., (2010), *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, PustakaMandiri, Jakarta.

Slameto., (2003). *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono., (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&P*, Bandung: Alfabeta

Soekanto, Soerjono., (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Titik, Triwulan Tutik., (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta

Tweedi, Steven., (2008). *Penguatan Manajemen Fraksi Meningkatkan Kinerja Fraksi dan Penyusunan Indikator Baseline Kinerja Fraksi di DPR RI*. Jakarta. UNDP Indonesia.

Jurnal/Skripsi

Sari, Dessi Permata., (2016). *Skripsi Pelaksana Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Partai Nasdem tahun 2014*, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Lolowang, Paendong Joan., (2021), *Peran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Kabupaten Minahasa*, Jurnal Politico, Vol.10, No. 4.

Tunggal, Alfines., (2013), *Skripsi : Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pratiwi, Indah., (2013), *Skripsi : Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang*, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

DASAR HUKUM

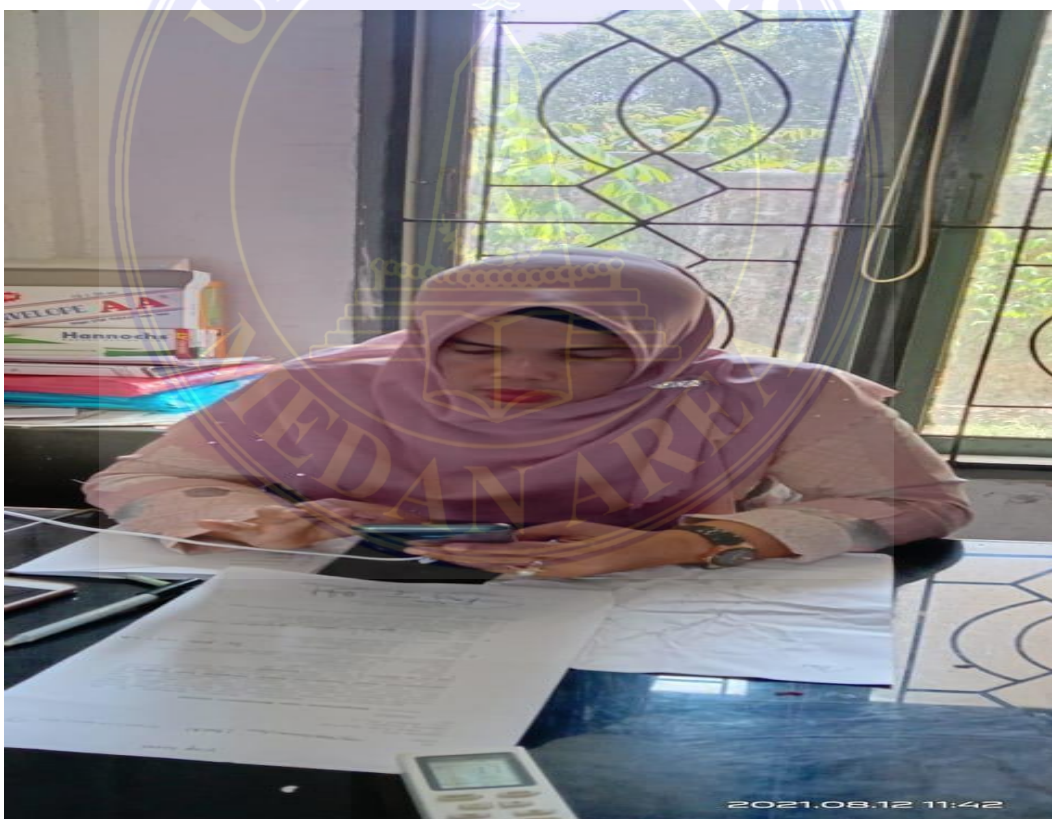
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang no 32 tahun 2004

LAMPIRAN I : DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN PENELITIAN



(Foto bersama anggota DPRK Aceh Singkil pada tanggal 06 Desember 2021, Pukul 17:00 Wib)



(Bersama Anggota DPRK Aceh Singkil, Ibu Tetty Wahyuni, 6 Desember 2021, Pukul 11:48)

LAMPIRAN II : KEGIATAN RESES/KUNJUNGAN



(Kunjungan pihak DPRK Aceh Singkil kepada Masyarakat, tanggal 05 Januari 2021, Pukul 14:00 Wib)



(Kunjungan pihak DPRK Aceh Singkil kepada Masyarakat, tanggal 05 Januari 2021, pukul 14:00 Wib)



(Kunjungan DPRK Aceh Singkil kepada Masyarakat, Tanggal 6 Agustus 2021, Pukul 17:00 Wib)



(Kunjungan DPRK Aceh Singkil kepada Masyarakat, Tanggal 6 Agustus 2021, Pukul 17:00 Wib)

LAMPIRAN III : PENYERAHAN BECAK



(Penyerahan Becak 7 unit di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil, 6 Desember 2021)



(Penyerahan Becak 7 unit di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil, 6 Desember 2021)


LAMPIRAN IV : PEDOMAN WAWANCARA (DPRK ACEH SINGKIL)

1. Bagaimana kondisi dan keluhan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan?
2. Bagaimana hubungan pihak DPRK Aceh Singkil terhadap masyarakat Simpang Kanan?
3. Bagaimana kunjungan dan pendekatan yang dilakukan DPRK Aceh Singkil terhadap masyarakat?
4. Bagaimana DPRK Aceh Singkil dalam memproses penampungan aspirasi masyarakat?
5. Seperti apa peran DPRK Aceh Singkil sebagai komunikator?
6. Apa saja yang sudah dilakukan DPRK Aceh Singkil dalam membantu dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
7. Bagaimana peran DPRK Aceh Singkil dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat?
8. Cara apa saja yang dilakukan dalam menampung aspirasi masyarakat?
9. Bagaimana DPRK Aceh Singkil dalam menyuarakan kepentingan masyarakat?
10. Apa saja hambatan dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan?

PEDOMAN WAWANCARA (MASYARAKAT SIMPANG KANAN)

1. Bagaimana tanggapan terkait aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Simpang Kanan?
2. Apa saja kunjungan dan kegiatan yang dilakukan DPRK Aceh Singkil terhadap masyarakat?
3. Bagaimana komunikasi dan pendekatan yang dilakukan DPRK Aceh Singkil kemasyarakat Simpang Kanan?
4. Apa tema dan arti penting dari kunjungan yang dilakukan?
5. Bagaimana peran yang dilakukan DPRK Aceh Singkil sebagai komunikator?
6. Apa saja bentuk dan keluhan masyarakat yang sudah diperjuangkan oleh DPRK Aceh Singkil?
7. Bagaimana peran DPRK Aceh Singkil dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat?
8. Cara apa saja yang dilakukan dalam menampung aspirasi masyarakat?
9. Bagaimana DPRK Aceh Singkil dalam menyuarakan kepentingan masyarakat?
10. Apa saja hambatan dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan?

LAMPIRAN V : SURAT PENELITIAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Nelayan Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanama@uma.ac.id

Nomor : 457/FIS.1/01.10/VI/2021 09 Juni 2021
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Ka. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupateb Aceh Singkil

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

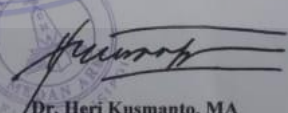
Nama : Hasanuddin Aritonang
N P M : 178510048
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dengan judul Skripsi **"Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Konstituen Di Kecamatan Simpang Kanan Dan Kecamatan Danau Paris Di Kabupaten Aceh Singkil"**


Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Heri Kusmanto, MA

CC : File,-

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
Jalan Singkil – Rimo Km. 22 Telp. (0658) 210017

Singkil Utara, 22 Juli 2021

NOMOR : 175/1173Setwan/2021
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Surat Telah Melakukan
Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate
Medan-20223

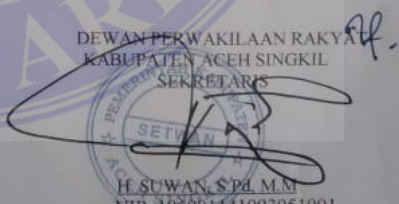
Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area- Medan Estate, Nomor: 454/FIS.1/01.10/VI/2021, Tanggal 9 Juni 2021, Perihal Izin Pengambilan data/riset, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : HASANUDDIN ARITONANG
NPM : 178510048
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penerapan Aspirasi Konstituen di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Danau Paris di Kabupaten Aceh Singkil

Telah melakukan pengambilan data/riset di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Jalan Singkil-Rimo Km. 20 Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIS

H. SUWAN, S.Pd, M.M
NIP. 196901141993051001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial dan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYERAPAN ASPIRASI KONSTITUEN DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dadan Ramdan,M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu DR.Effiati Juliana Hasibuan,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis,S.Sos,M.I.Pol selaku Ka Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., MIP selaku Pembimbing II dan juga Ka Prodi yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Semua Informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Januari 2022

Hasanuddin Aritonang
178510048

ABSTRAK

Anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dengan rumusan masalah Bagaimana peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi konstituen dan Apa saja hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap aspirasi konstituen di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu melalui : peran sebagai komunikator, dimana anggota DPRK Aceh Singkil dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, keuangan dan pengawasan akan tetapi DPRK Aceh Singkil terus berusaha sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik untuk menampung dan menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi dengan melakukan reses (kunjungan secara langsung), Sementara itu peran sebagai aktor yang dilakukan DPRK Aceh Singkil ialah menjalankan peran dan kredibilitasnya selaku wakil rakyat secara optimal dengan menyuarakan aspirasi masyarakat, pemberian bantuan dalam bentuk sosial ekonomi dan pendidikan walaupun belum menyeluruh keseluruhan daerah. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Simpang Kanan berdasarkan hasil penelitian mengalami 2 (dua) kendala, yaitu: keterbatasan waktu anggota dewan dalam mengatur pertemuan dan jadwal kepada masyarakat, yang kedua yaitu minimnya partisipasi masyarakat Simpang Kanan untuk mengikuti program dan kunjungan yang sudah dijadwalkan oleh para pihak Kecamatan dan DPRK Aceh Singkil (timbulnya kekecewaan masyarakat Simpang Kanan).

Kata Kunci : Peran, DPRD Aceh Singkil, Aspirasi Masyarakat

ABSTRACT

Members of the Regency DPRD, among others, have the obligation to absorb and collect constituents' aspirations through regular working visits, accommodate and follow up on community aspirations and complaints, and provide moral and political accountability to constituents in their constituencies. With the formulation of the problem What is the role of members of the House of Representatives in absorbing the aspirations of their constituents and what are the obstacles faced by the House of Representatives of Aceh Singkil Regency in absorbing the aspirations of constituents in Simpang Kanan District, Aceh Singkil Regency?. Where in this study the author uses qualitative research methods used to examine the condition of natural objects where the researcher is the key instrument, sampling of data sources is carried out purposively, collection techniques are triangulation, data analysis is inductive/qualitative, and qualitative research results are more emphasize meaning rather than generalization.

Based on the results of the research that the role of DPRD members in absorbing the aspirations of the people in Simpang Kanan District is carried out through 2 (two) stages, namely through: the role of communicators, where members of the Aceh Singkil DPRK in the government system do not only act as makers of legislation, finance and supervision. however, the Aceh Singkil DPRK continues to strive as a medium of communication between the community and the government, both to accommodate and convey information, socialization, motivation and as a place for discussion by conducting recess (direct visits), Meanwhile the role as an actor carried out by the Aceh Singkil DPRK is to carry out their role and credibility as people's representatives optimally by voicing the aspirations of the community, providing assistance in the form of socio-economic and education although it is not yet comprehensive throughout the region. The aspirations of the Simpang Kanan community based on the results of the study experienced 2 (two) obstacles, namely: limited time for council members in arranging meetings and schedules for the community, the second was the lack of participation of the Simpang Kanan community to participate in programs and visits that had been scheduled by the District and DPRK Aceh Singkil (the emergence of disappointment in the Simpang Kanan community).

Keywords: Role, DPRD Aceh Singkil, Community Aspiration

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Masalah	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Peran	5
2.2 Dewan Perwakilan Rakyat.....	10
2.3 Aspirasi	15
2.4 Penyerapan Aspirasi Masyarakat.....	17
2.5 Konstituen.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu	21
2.7 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2.1 Lokasi Penelitian	28
3.2.2 Waktu Penelitian	29
3.3 Informan Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknis Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Profil Lokasi Penelitian	35
4.1.2 Karakteristik fisik dasar	37
4.1.3 Profil Sosial Keagamaan.....	40
4.1.4 Indeks pembangunan Manusia	41
4.1.5 Profil Ekonomi.....	42
4.1.6 Penduduk Kabupaten Aceh Singkil	43
4.1.7 Profil Masyarakat Singkil	45
4.1.8 Profil Kecamatan Simpang Kanan.....	47
4.1.9 Profil DPRK Aceh Singkil.....	51
4.1.10 Susunan, Kedudukan dan Fungsi DPRD	54
4.1.11 Tugas pokok dan fungsi DPRK Aceh Singkil	56

4.2 Hasil Pembahasan.....	59
4.2.1 Peran Anggotan DPRK Aceh Singkil dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan.....	59
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran aNggotan DPRK Aceh Singkil Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Simpang kanan	83
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Indeks pembangunan Kabupaten Aceh Singkil	42
Tabel 4.2. Jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan	43
Tabel 4.3. Jumlah penduduk berdasarkan Desa	48
Tabel 4.4. Pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Singkil	52
Tabel 4.5 Anggota DPRK Aceh Singkil	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Denah Lokasi Penelitian.....	36
Gambar 4.3 Penyerahan Bantuan Becak.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi dengan informan penelitian
2. Dokumentasi reses/kunjungan ke masyarakat
3. Dokumentasi penyerahan bantuan ke masyarakat berupa becak
4. Pedoman wawancara
5. Surat penelitian

